

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Moneter

Pengertian teori moneter adalah teori yang membahas mengenai pasar uang atau dengan kata lain teori mengenai permintaan dan penawaran akan uang. Sedangkan secara luas arti teori moneter adalah : analisa mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi permintaan akan uang (*demand for money*) dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi penawaran akan uang (*supply of money*). Permintaan dan penawaran di dalam pasar akan menentukan harga.

2.1.1.1 Pandangan Keynes

Pandangan Keynes berkeyakinan tingkat bunga bergantung kepada jumlah uang yang beredar dan preferensi likuiditas atau penawaran uang. Yang dimaksudkan dengan preferensi likuiditas adalah permintaan atas uang oleh seluruh masyarakat dalam perekonomian. Keynes menyatakan bahwa permintaan uang oleh masyarakat mempunyai tiga motivasi / tujuan, yaitu : (i) untuk transaksi, yaitu masyarakat meminta uang untuk membayar konsumsi yang dilakukannya, (ii) untuk berjaga-jaga, yaitu untuk menghadapi masalah yang tidak terduga-duga, seperti kematian dan kehilangan pekerjaan, dan (iii) untuk spekulasi, yaitu untuk ditanamkan ke saham-saham atau surat berharga lain. (Sadono Sukirno 2004:388)

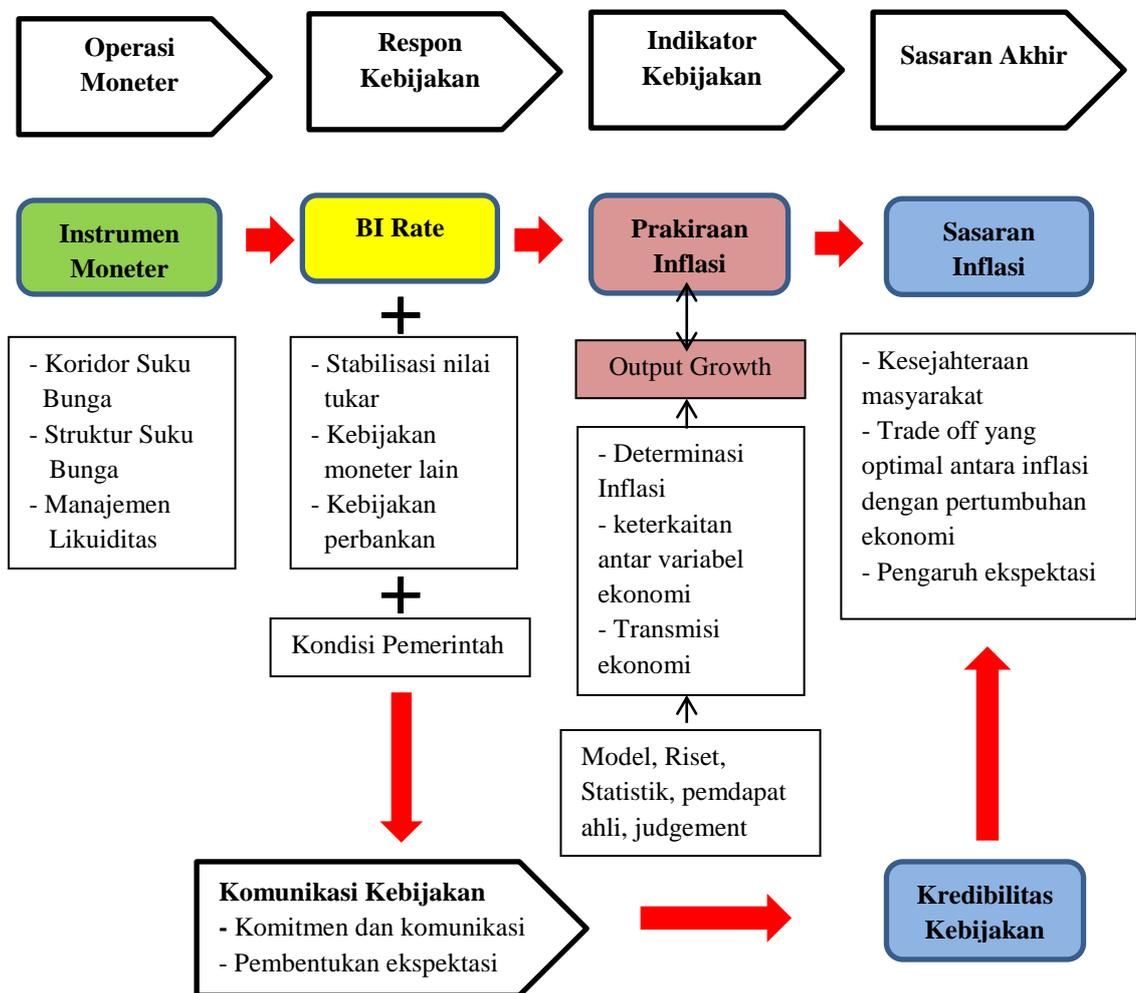
2.1.1.2 Bank Indonesia Sebagai Pembuat Kebijakan Moneter Di Indonesia

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

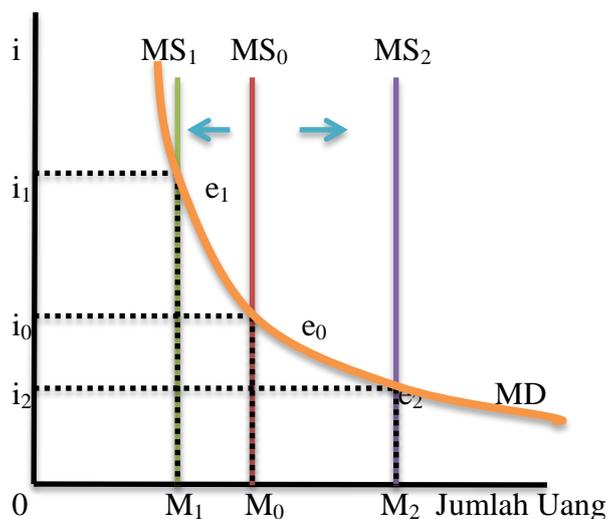
Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. berikut tugas dan fungsi Bank Indonesia:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
3. Mengatur dan mengawasi Bank untuk stabilitas sistem keuangan.

Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework (ITF) dengan penggunaan suku bunga sebagai sasaran operasional. Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak 1 Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kebijakan moneter yang menerapkan uang primer (base money) sebagai sasaran kebijakan moneter. Berikut Inflation Targeting Framework yang telah dituangkan dalam bentuk kerangka:



Berdasarkan kerangka tersebut, dalam menstabilkan perekonomian negara BI sebagai pembuat kebijakan moneter menggunakan suku bunga atau dalam hal ini BI rate sebagai instrumen moneter untuk menstabilkan tingkat inflasi. Berikut gambaran bagaimana BI membuat kebijakan untuk menstabilkan inflasi yang telah dituangkan kedalam gambar kurva:



Dalam menangani inflasi ada dua kebijakan moneter yang akan dilakukan, yaitu kebijakan moneter yang bersifat ekspansif dan kebijakan moneter yang bersifat kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif (melalui penambahan jumlah uang beredar) : pembelian surat berharga, pengurangan cadangan minimum, dan pengurangan tingkat bunga pinjaman. Kebijakan ini dilakukan ketika nilai inflasi dirasa terlalu rendah sehingga mengakibatkan perekonomian yang lesu. Kebijakan ini berupa menambah jumlah uang beredar dengan cara menurunkan tingkat suku bunga sehingga akan menggeserkan garis MS_0 ke kanan menjadi MS_2 . selanjutnya kebijakan moneter kontraktif (melalui pengurangan jumlah uang beredar) : penjualan surat berharga, penambahan cadangan minimum, dan penambahan tingkat bunga pinjaman. Kebijakan ini dilakukan saat tingkat inflasi dirasa terlalu tinggi, maka BI akan menaikkan tingkat suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar sampai tingkat inflasi menurun sesuai target. Hal tersebut bisa digambarkan dengan pergeseran garis MS_2 ke MS_1 . Dimana dengan dinaikannya tingkat suku bunga akan mengurangi jumlah uang beredar yang semula ada pada titik M_2 menjadi ke titik M_1 .

Pergeseran garis MS (dalam hal ini mewakili kebijakan moneter dalam menetapkan dan mengatur nilai tingkat suku bunga) kearah kanan, bukan hanya karena akibat dari kebijakan moneter ekspansif, namun juga bisa dikarenakan pendapatan masyarakat meningkat, sehingga permintaan atas uang pun meningkat.

2.1.2 Penyaluran Kredit

2.1.2.1 Pengertian Penyaluran Kredit

Adapun menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 menjelaskan mengenai perkreditan adalah sebagai berikut.

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga”.

Adapun menurut Kasmir (2008) mengenai penyaluran kredit sebagai berikut.

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Adapun menurut Julius R. Latumerissa (2014. 118) mengenai kredit sebagai berikut.

“Manajemen perkreditan pada dasarnya adalah merupakan proses yang terintegrasi dimana sumber-sumber dan kegiatan berhubungan dengan bidang perkreditan ini direncanakan, diorganisir, dan diadministrasikan dengan lengkap”.

Berdasarkan teori diatas dapat ditinjau bahwa penyaluran kredit merupakan penyediaan berupa uang ataupun tagihan yang diperuntukkan untuk

pihak lain dalam hal ini debitur (pihak ketiga) berdasarkan perjanjian antara pihak bank dan pihak debitur (pihak ketiga) berupa perjanjian pinjam-meminjam dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang mana pihak debitur akan melunasi utangnya ditambah dengan bunga dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan dan perjanjian yang sudah disepakati. Dalam hal ini juga dibahas mengenai manajemen perkreditan yang pada dasarnya merupakan proses yang saling terintegrasi dalam hal ini kredit mulai dari perencanaan, organisasi, dan administrasi secara lengkap.

2.1.2.2 Fungsi Menyalurkan Dana (Kredit)

Menurut Mudjarad Kuncoro dan Suhardjono (2011, 74) menjelaskan mengenai fungsi menyalurkan kredit sebagai berikut.

“Semua kegiatan bank dalam rangka menyalurkan dana (kredit) akan tercatat dalam neraca bank pada sisi aktiva. Oleh karena itu untuk melihat sisi hasil usaha bank dalam penyaluran dana (kredit) kepada masyarakat serta melihat struktur komposisi penempatan dana dan perkembangannya, dapat dilihat pada neraca bank sisi aktiva serta membandingkannya dengan posisi tahun-tahun sebelumnya”.

Dalam menempatkan dana dalam bentuk kredit sebagaimana sejalan dengan fungsi menyalurkan kredit. Menurut Mudjarad Kuncoro dan Suhardjono (2011, 72) menjelaskan hal-hal yang menjadi perhatian penting bagi perbankan bertalian dengan fungsi menyalurkan kredit sebagai berikut.

1. Prinsip 5C

- a. *Character*, pada dasarnya menunjukkan bagaimana karakter calon nasabah yang akan diberi kredit.
- b. *Capital*, mentikberatkan pada aspek permodalan calon nasabah.

- c. *Collateral*, merupakan agunan atau jaminan yang dimiliki oleh calon nasabah.
- d. *Capacity*, adalah kapasitas atau kemampuan pihak penerima kredit untuk membayar bunga dan cicilan kredit.
- e. *Condition Of Economy*, merupakan kondisi perekonomian pada saat kredit dikucurkan.

2. Macam Kredit

- a. Pengelompokan kredit berdasarkan ciri dan tujuan penggunaannya, antara lain kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumtif.
- b. Pengelompokan kredit berdasarkan cara pelunasannya, antara lain dengan angsuran tetap, kredit dengan plafon menurun setiap periode tertentu dan kredit dengan *plafond* tetap.
- c. Pengelompokan kredit berdasarkan jangka waktu, antara lain kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang.
- d. Pengelompokan kredit berdasarkan besarnya fasilitas kredit, antara lain kredit kecil (misalnya kredit usaha kecil), kredit menengah, dan kredit besar.
- e. Pengelompokan kredit berdasarkan bentuk kredit, antara lain berbentuk persekot dan kredit berbentuk rekening koran.

3. Sektor Ekonomi Penyaluran Kredit

- a. Sektor pertanian, misalnya perkebunan, perikanan, kehutanan, perdagangan pangan, dan sebagainya.

- b. Sektor pertambangan, misalnya tambang emas, batubara, minyak, gas alam, dan sebagainya.
- c. Sektor perdagangan, misalnya industri semen, industri mobil, industri makanan, dan sebagainya.
- d. Sektor jasa-jasa, misalnya jasa konsultan, perbankan, rumah sakit, dan sebagainya.
- e. Sektor properti, misalnya perumahan, perhotelan, perkantoran, pertokoan, dan sebagainya.

2.1.2.3 Prosedur Penyaluran Kredit

Prosedur penyaluran kredit merupakan tugas dan wewenang pihak bank. Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2007) menjelaskan mengenai prosedur penyaluran kredit sebagai berikut.

1. Calon debitur menulis nama, alamat, angunan, dan jumlah kredit yang diinginkan pada formulir aplikasi permohonan kredit,
2. Calon debitur mengajukan jenis kredit yang diinginkan,
3. Analisis kredit dengan cara mengikuti asas 6C, 7P, dan 3R dari permohonan kredit tersebut,
4. Karyawan analisis kredit menetapkan besarnya plafond kredit atau *Legal Lending Limit (L3)* atau BMPK-nya,
5. Jika BMPK disetujui nasabah, akad kredit (perjanjian kredit) ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Setelah melakukan proses pengisian identitas lengkap beserta lampiran berkas (dokumen) pendukung, menentukan jumlah kredit yang diinginkan, dan memilih jenis kredit yang diinginkan, selanjutnya berkas (dokumen) yang sudah dilengkapi akan diberikan kepada pihak bank dalam hal ini Divisi Analisis Kredit bank bersangkutan.

Analisis kredit akan memproses berkas (dokumen) yang sudah diterima dari pihak ketiga berdasarkan asas 6C, 7P, dan 3R. Berikut adalah penjelasan asas tersebut.

1. 6C

a. *Character*

Character adalah keadaan watak dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter tersebut untuk mengetahui sampai dimana nasabah mampu memenuhi kewajibannya dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal diatas dapat ditinjau upaya yang dilakukan seorang analis kredit untuk memperoleh gambaran calon nasabah. Adapun usaha yang dapat ditempuh adalah.

- 1) Meneliti riwayat hidup calon nasabah,
- 2) Meneliti reputasi calon nasabah tersebut dilingkungan usahanya,
- 3) Meminta sistem informasi debitur,
- 4) Mencari informasi kepada asosiasi usaha dimana calon nasabah berada,
- 5) Mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi,

6) Mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hobi berfoya-foya.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditinjau bahwa karakter seorang calon debitur menjadi hal yang penting sebagai bahan pertimbangan oleh seorang petugas analis kredit, karena keputusan pemberian kredit merupakan penilaian kinerja bagi petugas tersebut.

b. *Capital*

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri, maka semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditinjau bahwa modal sendiri juga diperlukan oleh Bank sebagai salah satu penilaian atas kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini menggambarkan bahwa calon nasabah juga akan menanggung risiko atas kegagalan usaha yang dijalankannya.

c. *Capacity*

Adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. kegunaan penilaian ini untuk kemngetahui sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi utang–utangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditinjau bahwa seorang analisis kredit juga menilai bagaimana kapasitas calon nasabah yang mengajukan kredit.

Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh analisis kredit seperti pendekatan historis (perkembangan dari waktu ke waktu), pendekatan finansial (latar belakang pendidikan para pengurus), pendekatan yuridis (kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian kredit dengan bank, pendekatan manajerial (kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan, dan pendekatan teknis (kemampuan nasabah mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi dan keuangan, *industrial relation*, sampai pada kemampuan merebut pasar).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditinjau bahwa kapasitas dari nasabah juga menjadi pertimbangan yang penting, dalam hal ini analisis kredit dapat menilai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan seorang analisis kredit untuk memberikan ataupun membatalkan permohonan kredit yang telah diajukan.

d. *Collateral*

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. *Collateral* akan dinilai oleh seorang analisis kredit untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial nasabah kepada Bank.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditinjau bahwa bentuk collateral yang diajukan oleh calon nasabah sebagai pertimbangan bagi pihak Bank untuk memberikan kredit yang diinginkan oleh calon nasabah sesuai

dengan agunan yang diberikan calon nasabah tersebut. *Collateral* tidak hanya dalam bentuk benda, tetapi juga collateral tak berwujud seperti jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi, dan avalis.

e. *Condition of Economy*

Adalah situasi, dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang kemungkinannya mempengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur. Berdasarkan pernyataan di atas juga dapat dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi ekonomi seperti keadaan konjungturnya, peraturan pemerintah, situasi politik dan perekonomian dunia, keadaan yang mempengaruhi pemasaran.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat ditinjau bahwa kondisi ekonomi yang terjadi juga menjadi bahan pertimbangan pihak bank dalam memberikan kreditnya kepada calon nasabah karena ketidakstabilan ekonomi juga mempengaruhi kondisi finansial bank, dikarenakan apabila memberikan kredit kepada debitur akan membuat risiko keuangan suatu bank menjadi tinggi dikarenakan keadaan ekonomi yang tidak stabil dan kekuatan finansial berkurang dikarenakan memberikan kredit kepada calon nasabah bank.

f. *Constraint*

Adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada pihak tertentu. Misalnya pendirian suatu usaha

pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel las atau pembakaran batu bata.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditinjau adalah lokasi pendirian usaha dan lingkungan disekitar usaha yang akan didirikan juga menjadi pertimbangan pihak Bank agar tidak terjadi kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi yang akan menyulitkan kedua belah pihak.

Berdasarkan enam pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pihak Bank dalam hal ini petugas yang mendapatkan mandat yaitu analisis kredit perlu memperhatikan enam kondisi tersebut sebagai bahan pertimbangan memberikan kredit kepada calon nasabah. Apabila salah satunya tidak sesuai harapan ataupun calon nasabah tidak memenuhi permohonan pengajuan kredit hendaknya ditolak.

2. 7P

- a. *Personality*, yakni menilai kepribadian calon nasabah ataupun tingkah lakunya sehari-hari maupun pada masa lalunya.
- b. *Party*, yakni mengklasifikasikan calon nasabah tersebut dalam klasifikasi atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.
- c. *Purpose*, yakni mengetahui tujuan calon nasabah dalam mengambil kredit, termasuk didalamnya jenis yang diinginkan nasabah.
- d. *Prospect*, yakni menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

- e. *Payment*, yakni ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja untuk pengambilan kredit yang diperolehnya.
- f. *Profitability*, yakni untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
- g. *Protection*, yakni menjaga kredit yang dikucurkan oleh Bank namun melalui satu perlindungan.

3. 3R

- a. *Return* (hasil yang dicapai), yakni penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah dibantu dengan kredit oleh Bank. Dalam arti lain yakni keuntungan yang diperoleh Bank apabila diberikan kredit kepada calon debitur.
- b. *Repayment* (pembayaran kembali), yakni menilai sampai sejauh mana perusahaan yang memohon kredit menanggung risiko kegagalan andai pada suatu saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
- c. *Prosedur Analisis Kredit*, yakni penyampaian permohonan yang dilakukan calon nasabah memiliki aturan-aturan tertentu dalam melengkapi dokumen pendukung. Mulai dari awal mengajukan sampai pertimbangan untuk pengambilan keputusan pemberian kredit.

Berdasarkan pernyataan diatas maka bagian analisis akan melakukan pekerjaannya dan mempertimbangkan keputusan apakah memberikan kredit atau menolaknya. Apabila telah mengambil keputusan untuk menerima permohonan kredit maka sebelumnya analisis kredit akan memberikan besar nilai kredit yang

akan diberikan. Nilai tersebut bisa saja sesuai yang diharapkan oleh calon nasabah dan bisa saja lebih rendah dari yang diajukan oleh calon nasabah tersebut. Setelah itu, pihak bank dan calon debitur yang sudah sampai pada kesepakatan nominal kredit yang akan diberikan maka kedua pihak akan melakukan akad kredit. dalam hal ini juga melakukan perjanjian terikat yang sudah disepakati oleh kedua pihak sebagai tanda sahnya pemberian kredit.

2.1.2.4 Tujuan Kredit

Adapun tujuan kredit menurut Suyatno (2007) bagi masyarakat dalam rangka memberikan fasilitas kredit sebagai berikut.

1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian
2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat
3. Memperlancar arus barang dan arus uang
4. Meningkatkan hubungan Internasional (L/C, CGI, dan lain-lain)
5. Meningkatkan produktivitas dana yang ada
6. Meningkatkan daya guna (*utility*) barang
7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat
8. Memperbesar modal kerja perusahaan
9. Meningkatkan *income per capita* (IPC) masyarakat
10. Mengubah cara berfikir / bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

Berdasarkan kutipan diatas dapat ditinjau bahwa tujuan kredit untuk meningkatkan kegiatan perdagangan dan perekonomian. Dalam hal ini memperluas lapangan kerja, memperlancar arus barang dan arus uang,

meningkatkan hubungan internasional, produktivitas dana, daya guna barang, gairah usaha masyarakat, memperbesar modal kerja, meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, dan merubah *mindset* masyarakat untuk lebih ekonomis.

2.1.3 Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate)

Suku bunga adalah harga dari penggunaan uang atau bias juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Atau harga dari meminjam uang untuk menggunakan daya belinya dan biasanya dinyatakan dalam persen (%).

Menurut Kasmir, (2002:121) suku bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.

Menurut teori dari aliran klasik “The Pure Theory of Interest”, tinggi rendahnya tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran akan modal. Jadi modal telah dianggap sebagai harga dari kesempatan penggunaan modal. Sama seperti harga barang-barang dan jasa, tinggi rendahnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran, demikian pula tinggi rendahnya bunga modal ditentukan oleh permintaan dan penawaran modal. Menurut teori klasik, tabungan merupakan fungsi dari tingkat bunga pada perekonomian akan mempengaruhi tabungan (saving) yang terjadi. Berarti keinginan masyarakat untuk menabung sangat tergantung pada tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga, semakin besar keinginan masyarakat untuk menabung atau masyarakat akan terdorong untuk mengorbankan pengeluaran guna menambah besarnya tabungan. Jadi tingkat suku

bunga menurut klasik adalah balas jasa yang diterima seseorang karena menabung atau hadiah yang diterima seseorang karena menunda konsumsinya.

Sadono Sukirno (2006:375) menyatakan suku bunga adalah bunga yang dinyatakan sebagai persentasi dari modal.

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu :

1. Bunga Simpanan

Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar kepada nasabahnya. Sebagai contoh : jasa giro, bunga tabungan, bunga deposito.

2. Bunga Pinjaman

Bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh : bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikelurkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan dana yang diterima dari nasabah. Bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh seandainya bunga simpanan tinggi maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian pula sebaliknya.

Menurut Bank Indonesia suku bunga (*BI Rate*) sebagai suku bunga acuan. Adapun Bank Indonesia mendefinisikan Suku Bunga (*BI Rate*) adalah

“*BI Rate* adalah suku bunga, kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik”.

Menurut Gup E. Benton (1984) dalam Julius R. Latumerissa (2014, 183) menjelaskan mengenai suku bunga adalah sebagai berikut.

“Suku bunga adalah harga yang dibayarkan atas penggunaan kredit.”

Menurut Mudjarad Kuncoro dan Suhardjono (2011, 278) penetapan tingkat suku bunga (*interest Rate*) dapat dipengaruhi beberapa faktor yang dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Kelompok Pinjaman, Faktor tersebut adalah *cost of funds*, premi resiko, biaya pelayanan, termasuk biaya *overhead* dan personel, margin keuntungan, dan frekuensi *repricing*.
2. Kelompok simpanan, yang dipertimbangkan adalah *cost of funds*, biaya pelayanan, termasuk biaya *overhead* dan personel, margin keuntungan, struktur target *maturity*, *pricing yield curve* simpanan berjangka, Cadangan Wajib Minimum likuiditas (CWM).

Bank Indonesia menjelaskan bahwa Suku bunga (*BI Rate*) diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga pasar uang antar bank *overnight* (PUAB O/N). Pergerakan di suku

bunga di PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit pada perbankan. Dengan mempertimbangkan faktor lain dalam perekonomian, suku bunga pasar uang akan menaikkan suku bunga (*BI Rate*) apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan *BI Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan berada dibawah sasaran yang ditetapkan.

Menurut Bank Indonesia Penetapan Respons (*Stances*) kebijakan moneter dilakukan setiap bulan melalui mekanisme Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan dengan cakupan materi bulanan. Berikut adalah jadwal penetapan dan penentuan suku bunga (*BI Rate*).

1. Respon kebijakan moneter suku bunga (*BI Rate*) ditetapkan sampai dengan RDG berikutnya.
2. Penetapan respon kebijakan moneter (*BI Rate*) dilakukan dengan memperhatikan efek tunda kebijakan moneter (*lag of monetary policy*) dalam mempengaruhi inflasi.
3. Dalam hal terjadi perkembangan diluar prakiraan semula, penetapan *stance* kebijakan moneter dapat dilakukan sebelum RDG bulanan melalui RDG mingguan.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditinjau bahwa penetapan respon suku bunga (*BI Rate*) dilakukan pada saat Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dalam hal ini akan mempertimbangkan dan melakukan *review* atas perkembangan inflasi, nilai tukar dan keadaan moneter serta kondisi likuiditas pasar apakah

sesuai dengan hasil yang sudah diperkirakan sebelumnya pada saat RDG. Suku bunga (*BI Rate*) juga mempertimbangkan berbagai informasi dari eksternal seperti *leading indicators*, survei, *expert opinion*., asesmen faktor risiko, dan juga ketidakpastian serta hasil riset ekonomi.

Menurut Bank Indonesia bertalian dengan besar perubahan suku bunga (*BI Rate*) adalah sebagai berikut.

“Respon kebijakan moneter dinyatakan dalam perubahan *BI Rate* (Secara konsisten dan bertahap dalam kelipatan 25 basis poin). Dalam kondisi untuk menunjukkan intensi Bank Indonesia yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran inflasi, maka perubahan *BI Rate* dapat dilakukan lebih dari 25 basis poin (bps) dalam kelipatan 25 bps”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditinjau bahwa perubahan suku bunga (*BI Rate*) berlaku kelipatan 25 basis poin. Hal ini bertalian dengan keadaan nyata situasi ekonomi moneter yang terjadi apakah akan menaikkan atau menurunkan suku bunga (*BI Rate*). Dalam hal ini tergantung kondisi moneter yang terjadi di Indonesia dalam upaya untuk menjaga kestabilan ekonomi.

2.1.4 Inflasi

Menurut Raharja dan Manurung dalam Nurul Huda, dkk (2014:175) inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Sedangkan menurut Sukirno, inflasi yaitu kenaikan dalam harga barang dan jasa, yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran di pasar. Dengan kata lain, terlalu banyak uang yang memburu barang yang terlalu sedikit. Inflasi biasanya menunjuk pada harga-harga

konsumen, tapi bisa juga menggunakan harga-harga lain (harga perdagangan besar, upah, dsb).

Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Definisi inflasi oleh para ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit penghitungan moneter) terhadap barang-barang/komoditas dan jasa. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap barang-barang/komoditas dan jasa didefinisikan sebagai deflasi (*deflation*) (Adiwarman Karim, 2008:135).

Inflasi merupakan kejadian ekonomi yang sering terjadi meskipun tidak pernah dikehendaki. Milton Friedman mengatakan inflasi ada dimana saja dan selalu merupakan fenomena moneter yang mencerminkan adanya pertumbuhan moneter yang berlebihan dan tidak stabil. Jadi inflasi adalah suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung secara terus menerus. Dari definisi tersebut, maka terdapat komponen yang perlu diamati untuk melihat terjadinya inflasi yaitu kenaikan harga, bersifat umum dan berlangsung terus-menerus dalam rentang waktu tertentu. Apabila terjadi kenaikan harga satu barang yang tidak mempengaruhi harga barang lain, sehingga harga tidak naik secara umum, hal tersebut bukanlah inflasi (Murni, 2006:202).

Kenaikan harga dapat diukur menggunakan indeks harga. Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur Inflasi adalah : indeks harga

konsumen (*consumer price index*), indeks harga perdagangan besar (*wholesale price index*), GNP deflator indeks harga konsumen (*consumers price index*), indeks harga produsen atau perdagangan besar (*wholesale price index*) dan indeks harga implisit (GNP *deflator* (Nopirin, 2009:25). Indeks harga konsumen adalah indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga-harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu. Jadi, IHK melihat inflasi dari sisi konsumen, sedangkan indeks harga perdagangan besar melihat inflasi dari sisi produsen. IHPB menunjukkan tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi. Perhitungan inflasi berdasarkan IHI dilakukan dengan menghitung perubahan angka indeks (Rahardja dan Manurung, 2005: 173-175).

Sejak dulu gejala inflasi dihubungkan dengan jumlah uang yang beredar. Terdapat beberapa teori mengenai jumlah uang beredar, dua diantaranya ialah: (1) Teori Klasik, bahwa fungsi uang hanyalah sebagai alat tukar. Oleh sebab itu, jumlah uang yang diminta dibanding proporsional dengan tingkat produk atau pendapatan nasional; dan (2) Teori Keynes berpendapat bahwa ada tiga motivasi orang memegang atau meminta uang antara lain motif transaksi, motif berjaga-jaga dan motif spekulasi (Murni, 2006:118-119).

Menurut Bambang Wijayanta & Aristanti Widyaningsih (2007:112-113) inflasi yang terjadi dapat dikelompokkan berdasarkan sifat, sebab terjadinya, dan berdasarkan asalnya.

1. Inflasi berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya, inflasi dibagi menjadi empat kategori utama, yaitu (a) Inflasi Rendah (*Creeping Inflation*), yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Inflasi ini dibutuhkan dalam ekonomi karena akan mendorong produsen untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa; (b) Inflasi Menengah (*Galloping Inflation*), yaitu inflasi yang besarnya antara 10-30% per tahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. Angka inflasi pada kondisi ini biasanya disebut inflasi 2 digit, misalnya 15%, 20%, dan 30%; (c) Inflasi Berat (*High Inflation*), yaitu inflasi yang besarnya antara 30-100% per tahun; dan (d) Inflasi Sangat Tinggi (*Hyperinflation*), yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit (diatas 100%). Pada kondisi ini, masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang, karena nilainya turun sangat tajam sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang.

2. Inflasi Berdasarkan Sebabnya

a. *Demand Pull Inflation*

Inflasi ini terjadi sebagai akibat pengaruh permintaan yang tidak diimbangi oleh peningkatan jumlah penawaran produksi. Akibatnya sesuai dengan hukum permintaan, jika permintaan banyak sementara penawaran tetap, harga akan naik. Jika hal ini berlangsung secara terus-menerus, akan mengakibatkan inflasi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya diperlukan adanya pembukaan kapasitas produksi baru dengan penambahan tenaga kerja baru.

b. *Cost Push Inflation*

Inflasi ini disebabkan karena kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan biaya *input* atau biaya faktor produksi. Akibat naiknya biaya faktor produksi, dua hal yang dapat dilakukan oleh produsen, yaitu langsung menaikkan harga produknya dengan jumlah penawaran yang sama atau harga produknya naik karena penurunan jumlah produksi.

c. *Bottle Neck Inflation*

Inflasi ini dipicu oleh faktor penawaran (*supply*) atau faktor permintaan (*demand*). Jika dikarenakan faktor penawaran maka persoalannya adalah sekalipun kapasitas yang ada sudah terpakai tetapi permintaannya masih banyak sehingga menimbulkan inflasi. Adapun inflasi karena faktor permintaan disebabkan adanya likuiditas yang lebih banyak, baik itu berasal dari sisi keuangan (*monetary*) atau akibat tingginya ekspektasi terhadap permintaan baru.

3. Inflasi Berdasarkan Asalnya

a. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*)

Inflasi ini timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara. Untuk mengatasinya, biasanya pemerintah melakukan kebijakan mencetak uang baru.

b. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*)

Inflasi ini timbul karena negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu negara mengalami inflasi yang tinggi. Kenaikan harga-harga di luar negeri atau di negara-negara mitra dagang utama (antara lain disebabkan melemahnya nilai tukar) yang secara langsung maupun tidak langsung

akan menimbulkan kenaikan biaya produksi biasanya akan disertai dengan kenaikan harga-harga barang.

Dampak inflasi terhadap suatu perekonomian menurut Herlan Firmansyah, dkk. (2014:149-150) diantaranya sebagai berikut: (1) Nilai suatu mata uang akan mengalami penurunan dan daya beli mata uang tersebut menjadi semakin rendah. Penurunan daya beli mata uang selanjutnya akan berdampak pada individu, dunia usaha dan APBN. Dengan kata lain, laju inflasi yang tinggi dapat berdampak buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan; (2) Inflasi mendorong redistribusi pendapatan diantara anggota masyarakat, hal inilah yang disebut dengan efek redistribusi dari inflasi. Inflasi akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi anggota masyarakat, sebab redistribusi pendapatan yang terjadi akibat inflasi akan mengakibatkan pendapatan riil satu orang meningkat, tetapi pendapatan riil yang lain akan jatuh. Umumnya bagi mereka yang berpendapatan tetap seperti pegawai negeri akan mengalami dampak negatif inflasi, hal tersebut dikarenakan inflasi yang tinggi pendapatan riil mereka akan turun; (3) Inflasi menyebabkan perubahan-perubahan dalam output dan kesempatan kerja. Hal tersebut terjadi dikarenakan inflasi memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukan selama ini; (4) Inflasi menyebabkan sebuah lingkungan yang tidak stabil bagi kondisi ekonomi. Jika konsumen memperkirakan tingkat inflasi di masa mendatang akan naik, maka akan mendorong mereka untuk melakukan pembelian barang-barang dan jasa secara besar-besaran pada saat sekarang dari pada mereka menunggu tingkat harga sudah meningkat lagi; dan (5) Inflasi cenderung memperendah tingkat bunga riil dan

menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan di pasar modal. Hal tersebut menyebabkan penawaran dana untuk investasi menurun, dan sebagai akibatnya, investor sektor swasta berkurang sampai ke bawah tingkat keseimbangannya.

Inflasi dapat menguntungkan golongan masyarakat tertentu tetapi merugikan golongan lain, sehingga menimbulkan ketegangan sosial. Oleh sebab itu, tiap-tiap negara berusaha menghindari inflasi dengan menerapkan berbagai kebijakan. Beberapa kebijakan untuk mengatasi inflasi menurut Ritonga, dkk. (2003:86-88) antara lain sebagai berikut :

1. Kebijakan moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral yang ingin mengurangi jumlah uang dengan cara mengendalikan pemberian kredit oleh bank umum kepada masyarakat. Alat kebijakan moneter dalam menanggulangi inflasi diantaranya adalah: (a) Politik diskonto, adalah politik bank sentral untuk mempengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan tingkat bunga. Dengan menaikkan tingkat bunga diharapkan jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang, karena orang akan lebih banyak menyimpan uangnya di bank dari pada menjalankan investasi; (b) Politik pasar terbuka yaitu bank sentral juga menjalankan politik pasar terbuka, yaitu dengan jalan membeli dan menjual surat-surat berharga. Dengan membeli surat-surat berharga diharapkan uang bertambah di masyarakat; (c) Politik persediaan kas ialah politik bank sentral untuk mempengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan prosentase persediaan kas dari bank. Dengan dinaikkan prosentase persediaan kas, maka diharapkan jumlah kredit akan berkurang.

2. Kebijakan fiskal

Dengan kebijakan fiskal, pemerintah mempengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Jenis kebijakan fiskal diantaranya adalah sebagai berikut: (a) Pengaturan pengeluaran pemerintah, yaitu pemerintah harus menjaga penggunaan anggaran negara agar sesuai dengan perencanaan. Kalau pembelanjaan negara melampaui batas yang telah ditentukan atau direncanakan akan mendorong penambahan uang beredar; (b)

Peningkatan tarif pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama. Dengan dinaikkannya tarif pajak, maka penghasilan rumah tangga akan diberikan kepada pemerintah, sehingga daya beli masyarakat atas barang dan jasa akan berkurang.

3. Kebijakan non moneter

Kebijakan non moneter dalam menanggulangi inflasi diantaranya meliputi: (a) Peningkatan produksi. Jika produksi meningkat, walaupun jumlah uang bertambah, inflasi tidak terjadi. Bahkan hal ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan perekonomian; (b) Kebijakan upah. Inflasi dapat diatasi dengan menurunkan pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) masyarakat. Penurunan *disposable income* dilakukan dengan menaikkan pajak penghasilan; (c) Pengawasan harga. Kecenderungan dinaikkannya harga oleh pengusaha dapat diatasi dengan penentuan harga maksimum oleh pemerintah. Namun, tindakan itu dapat menyebabkan timbulnya jual beli barang tanpa mengindahkan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah (*black market*). Untuk mengatasi keadaan itu, pendistribusian barang-barang tersebut kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah.

2.1.5 Nilai Tukar (Kurs)

Setiap negara memiliki mata uang yang berbeda-beda dan juga memiliki nilai. Dengan memiliki nilai, maka dapat diukur perbandingan mata uang dari tiap-tiap negara tersebut.

Nilai tukar atau yang lebih populer dikenal dengan sebutan kurs mata uang adalah catatan harga pasar dari mata uang asing dalam harga mata uang domestik.

Kurs didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Nilai kurs akan berbeda dengan mata uang suatu negara (Murni, 2006:244). Nilai tukar (kurs) menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain (Sadono Sukirno, 2006:397). Nilai tukar antara negara satu dengan negara lain tidaklah sama.

Para ekonom membedakan kurs menjadi dua, yaitu: (1) Kurs nominal, adalah harga relatif dari mata uang dua negara dan (2) Kurs riil, adalah harga relatif dari barang-barang di antara dua negara. Kurs riil menyatakan tingkat dimana kita bisa memperdagangkan barang-barang dari suatu negara untuk barang-barang dari negara lain (N. Gregory Mankiw, 2006:128).

Perubahan dalam permintaan dan penawaran suatu valuta, yang selanjutnya menyebabkan perubahan dalam kurs valuta disebabkan oleh beberapa faktor, menurut N. Gregory Mankiw (2006:402-403) antara lain:

1. Perubahan citarasa masyarakat

Citarasa masyarakat mempengaruhi corak konsumsi mereka. Maka perubahan citarasa masyarakat akan mengubah corak konsumsi mereka atas barang-barang yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor. Perbaikan kualitas barang-barang dalam negeri menyebabkan keinginan mengimpor berkurang dan dapat pula menaikkan ekspor. Sedangkan perbaikan kualitas barang-barang impor menyebabkan keinginan masyarakat untuk mengimpor bertambah besar. Perubahan-perubahan tersebut akan mempengaruhi permintaan dan penawaran akan valuta asing.

2. Perubahan harga barang ekspor dan impor

Harga suatu barang merupakan salah satu faktor penting yang menentukan apakah suatu barang akan diimpor atau diekspor. Barang-barang dalam negeri yang dapat dijual dengan harga yang relatif murah akan menaikkan ekspor dan apabila harganya naik maka ekspornya akan berkurang. Pengurangan harga barang impor akan menambah jumlah impor, dan sebaliknya, kenaikan harga barang impor akan mengurangi impor. Dengan demikian perubahan harga-harga barang ekspor dan impor akan menyebabkan perubahan dalam penawaran dan permintaan atas mata uang negara tersebut.

3. Kenaikan harga umum (inflasi)

Inflasi sangat besar pengaruhnya terhadap kurs valuta asing. Inflasi yang berlaku pada umumnya cenderung untuk menurunkan nilai valuta asing. Kecenderungan tersebut disebabkan efek inflasi yang menyebabkan harga-harga di dalam negeri lebih mahal dari harga-harga di luar negeri dan karena itu inflasi akan menambah impor yang menyebabkan permintaan atas valas bertambah. Selain itu inflasi menyebabkan harga-harga barang ekspor menjadi lebih mahal, karena itu inflasi cenderung mengurangi ekspor yang menyebabkan penawaran atas valas berkurang. Maka harga valas akan bertambah (berarti harga mata uang negara yang mengalami inflasi merosot).

4. Perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi

Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi sangat penting peranannya dalam mempengaruhi aliran modal. Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang rendah cenderung akan menyebabkan modal dalam negeri

mengalir ke luar negeri. Sedangkan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi akan menyebabkan modal luar negeri masuk ke negara tersebut. apabila lebih banyak modal mengalir ke suatu negara, permintaan atas mata uangnya bertambah, maka nilai mata uang tersebut bertambah. Nilai mata uang suatu negara akan merosot apabila lebih banyak modal negara yang dialirkan ke luar negeri karena suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi di negara-negara lain.

5. Pertumbuhan ekonomi

Efek yang diakibatkan oleh kemajuan ekonomi terhadap nilai mata uangnya tergantung pada corak pertumbuhan ekonomi yang berlaku. Apabila kemajuan tersebut diakibatkan oleh perkembangan ekspor, maka permintaan atas mata uang negara itu bertambah lebih cepat dari penawarannya akan menaikkan nilai mata uangnya. Tetapi, apabila kemajuan tersebut menyebabkan impor berkembang lebih cepat dari ekspor, penawaran mata uang negara itu lebih cepat bertambah dari permintaannya dan akan menurunkan nilai mata uang negara tersebut.

Nilai tukar atau kurs tergantung pada permintaan dan penawaran, secara khusus setiap negara dapat mempengaruhi kurs valuta sing terhadap mata uang negaranya sendiri. Sistem kurs dibagi menjadi 3 yaitu, (1) Sistem kurs tetap (*Fixed Exchange Rate System*) adalah kurs yang ditetapkan oleh pemerintah. Sistem kurs ini akan berlaku untuk seluruh jenis transaksi yang melibatkan dua atau lebih mata uang yang berbeda. Bila kurs naik ataupun turun, pemerintah dalam hal ini sebagai pemegang otoritas moneter, harus berusaha mengembalikan

pada kurs yang sudah ditetapkan. Jika pasar kelebihan penawaran yang berakibat kurs turun atau lebih rendah dari harga kurs tetap, pemerintah akan membeli valuta asing. Dengan pembelian ini, permintaan akan mengurangi penawaran, yang mengakibatkan harga kembali ke kurs tetap. Sebaliknya, ketika pasar kelebihan permintaan, artinya kurs naik melebihi harga patokan, pemerintah harus menjual valuta asing yang ada pada cadangan untuk menambah penawaran; (2) Sistem kurs bebas (*Free-Floating Exchange Rate System*) adalah sistem kurs yang ditentukan oleh pasar tanpa campur tangan pemerintah. Ada beberapa keunggulan sistem kurs bebas antara lain sebagai berikut: (a) Pemerintah tidak perlu menyediakan cadangan devisa untuk mengendalikan pasar, (b) Tidak ada pasar gelap seperti yang terjadi pada sistem kurs tetap, dan (c) Kurs yang berlaku adalah kurs keseimbangan; dan (3) Sistem kurs mengambang terkendali (*Managed Floating Exchange Rate System*) adalah kurs yang ditentukan oleh pasar dalam kisaran tertentu. Jika kurs melebihi kisaran tersebut maka pemerintah akan campur tangan. Pemerintah mempengaruhi nilai tukar melalui intervensi pasar apabila kurs naik atau turun melebihi batas yang telah ditentukan (Alam S, 2004: 22-23).

2.1.6 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Menurut Darmawi (2011:91), salah satu komponen faktor permodalan adalah kecukupan modal. Rasio untuk menguji kecukupan modal bank yaitu rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Agar definisi CAR menjadi lebih jelas, berikut beberapa definisi CAR yang dikemukakan oleh para ahli:

Menurut Hasibuan (2009:58), CAR adalah salah satu cara untuk menghitung apakah modal yang ada pada suatu bank telah memadai atau belum.

Menurut Kasmir (2014:46), CAR adalah perbandingan rasio tersebut antara rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko dan sesuai ketentuan pemerintah.

Menurut Bank Indonesia (Nomor 9/13/PBI/2007), CAR adalah penyediaan modal minimum bagi bank didasarkan pada risiko aktiva dalam arti luas, baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontijen dan/atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga maupun risiko pasar.

Berdasarkan definisi menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, seperti kredit yang diberikan kepada nasabah.

Menurut Sudirman (2013:112), ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) merupakan jumlah timbangan risiko aktiva neraca dan rekening administratif bank. Aktiva neraca dan aktiva administratif telah dibobot sesuai tingkat bobot risiko yang telah ditentukan. Masing-masing pos dalam aktiva diberikan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau golongan nasabah atau sifat agunan. Pengawasan mengenai ketentuan tentang ATMR adalah untuk memastikan bahwa batas maksimum ATMR berdasarkan pembobotan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bobot risiko berkisar antara 0-100% tergantung dari tingkat likuidnya,

semakin likuid aktiva maka semakin kecil bobot risikonya. Tujuan pembatasan 11 ATMR adalah untuk mengendalikan pertumbuhan aset bank yang memberikan return tinggi dengan resiko rendah.

Menurut Hasibuan (2009:58), langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank adalah sebagai berikut:

- a. ATMR aktiva neraca dihitung dengan mengalikan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos.
- b. ATMR administratif dihitung dengan mengalikan nominal nilai rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risikonya. Misalnya yang termasuk aktiva administrasi, fasilitas kredit yang belum diberikan, penjualan dan pembelian karena transaksi devisa serta bank garansi.
- c. Total ATMR = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administratif.

Menurut Sudirman (2013:111), cara menghitung besarnya jumlah modal bank yaitu dengan cara menambahkan modal inti ditambah dengan modal pelengkap. Modal inti terdiri dari modal yang disetor oleh pemilik, sumbangan, agio saham, dana setoran modal, modal sumbangan, dan sebagainya. Sedangkan modal pelengkap hanya dapat diperhitungkan maksimum 100% dari modal inti yang terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, penyisihan penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), modal pinjaman, dan sebagainya. Kewajiban kebutuhan modal minimum dihitung dengan mengalikan ATMR dengan 8%. Rasio modal dihitung dengan membandingkan modal minimum dengan ATMR. Menurut Darmawi (2011:99), dengan kata lain yaitu CAR 8% berarti jumlah kapital adalah sebesar 8% dari ATMR, atau sebaliknya jumlah ATMR adalah sebesar 12,5 kali modal yang tersedia atau dimiliki bank yang bersangkutan. Semakin tinggi CAR semakin baik kinerja suatu bank. Besarnya modal suatu bank, akan mempengaruhi

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Menurut Hasibuan (2009:58), rasio CAR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Sendiri (Modal inti + Modal Pelengkap)}}{\text{ATMR (Neraca Aktiva + Neraca Adm)}} \times 100\%$$

Tabel 2.1

Matriks Kriteria Peringkat Komponen CAR

Rasio	Peringkat	Predikat
$CAR \geq 12\%$	1	Sangat Baik
$9\% \leq CAR < 12\%$	2	Baik
$8\% \leq CAR < 9\%$	3	Cukup
$6\% < CAR < 8\%$	4	Tidak Baik
$CAR \leq 6\%$	5	Sangat Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 13/1/PBI/2011

2.1.7 Return On Assets (ROA)

Pengertian *Return on Asset* (ROA) menurut Muhamad (2014:254) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.

Dendawijaya (2009:118) adalah *Return on Assets* (ROA) merupakan rasio paling baik digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi bank. ROA merefleksikan kemampuan manajemen bank dalam mengalokasikan asetnya untuk menghasilkan laba.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DBPS/2007, ROA digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba.

Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan *asset*.

Return on Assets (ROA) didasarkan pada pendapatan bahwa karena aktiva didanai oleh para pemegang saham dan kreditor, maka rasio ini harus dapat memberikan ukuran produktivitas aktiva dalam pengembalian kepada para penanam modal tersebut. Oleh karena itu rasio *Return on Assets* (ROA) sering disamakan dengan rasio *Return on Investment* (ROI).

Menurut Muhamad (2014:254), *Return on Assets* (ROA) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total aktiva}} \times 100\%$$

Sistem penilaian tingkat kesehatan bank diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 2.2

Kriteria Penilaian Peringkat ROA

Peringkat	Standar	Kriteria
1	$ROA > 1,5\%$	Perolehan laba sangat tinggi atau sangat sehat
2	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Perolehan laba tinggi atau sehat
3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Perolehan laba cukup tinggi atau cukup sehat
4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Perolehan laba rendah atau kurang sehat
5	$ROA \leq 0\%$	Perolehan laba sangat rendah atau tidak sehat

Sumber : SE Bank Indonesia No.9/24/DPbs Tahun 2007

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbs Tahun 2007, hasil penilaian peringkat masing-masing faktor ditetapkan peringkat komposit sebagai berikut:

1. Peringkat komposit 1, mencerminkan bahwa bank tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan.
2. Peringkat komposit 2, mencerminkan bahwa bank tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun bank masih memiliki kelemahan.
3. Peringkat komposit 3, mencerminkan bahwa bank tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila bank tidak segera melakukan tindakan korektif.
4. Peringkat komposit 4, mencerminkan bahwa bank tergolong kurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industry keuangan yang serius atas kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.
5. Peringkat komposit 5, mencerminkan bahwa bank sangat sensitive terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, industri keuangan, dan mengalami kesulitan yang mambahayakan kelangsungan usaha.

2.1.8 *Non Performing Loan (NPL)*

Salah satu resiko yang dihadapi oleh bank adalah resiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada debitur atau disebut dengan resiko kredit.

Menurut Dahlan Siamat (2011:92) resiko kredit merupakan :

“suatu resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan atau dijadwalkan.”

Resiko kredit didalamnya termasuk *Non Performing Loan*. *Non Performing Loan* (NPL) adalah kredit yang bermasalah dimana debitur tidak dapat memenuhi pembayaran tunggakan peminjaman dan bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.

Hal ini juga dijelaskan dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 31 (revisi 2000) yang menyebutkan bahwa :

“kredit *non performing* pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok/atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan.”

Selain itu As. Mahmoedin (2010: 3) juga mengatakan,

“Kredit bermasalah merupakan kredit dimana debeturnya tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya mengenai pembayaran bunga, pengembalian pokok pinjaman, peningkatan agunan”

Menurut Dahlan Siamat (2011:174) menjelaskan kredit bermasalah adalah :

”Kredit bermasalah/*problem loan* dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur.”

Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami kerugian potensial. Perlu diketahui bahwa menganggap kredit bermasalah selalu dikarenakan kesalahan nasabah merupakan hal yang salah.

Kredit bermasalah menjadi bermasalah dapat dikarenakan kredit bermasalah dapat dikarenakan oleh berbagai hal yang berasal dari nasabah, dari kondisi internal dan pemberi kredit.

Yang termasuk ke dalam *Non Performing Loan* adalah kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001, NPL dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{NPL} = \frac{\text{kredit kurang lancar} + \text{kredit diragukan} + \text{kredit macet}}{\text{Total kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

Peningkatan NPL dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan bank, oleh karena itu bank dituntut untuk selalu menjaga kredit tidak dalam posisi NPL yang tinggi.

Agar dapat menentukan tingkat wajar atau sehat maka ditentukan ukuran standar yang tepat untuk NPL. Dalam hal ini Bank Indonesia menetapkan bahwa tingkat NPL yang wajar adalah $\leq 5\%$ dari total portofolio kreditnya.

Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah menurut Veithzal Rifai (2011:478) adalah sebagai berikut :

1. Karena Kesalahan Bank
 - a. Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah
 - b. Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali
 - c. Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah
 - d. Kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat
 - e. Pemberian kelonggaran yang terlalu banyak
 - f. Tidak punya kebijakan perkreditan yang sehat

2. Karena Kesalahan Nasabah
 - a. Nasabah tidak kompeten
 - b. Nasabah kurang pengalaman
 - c. Nasabah tidak jujur
 - d. Nasabah serakah
3. Faktor Eksternal
 - a. Kondisi perekonomian
 - b. Bencana alam
 - c. Perubahan peraturan.

Menurut As. Mahmoedin (2010:111) dapat disimpulkan bahwa bagi kredit bermasalah ini akan berdampak pada daya tahan perusahaan antara lain likuiditas, rentabilitas, profitabilitas, bonafiditas, tingkat kesehatan bank dan modal kerja. Dampak-dampak tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Likuiditas

Likuiditas merupakan hal yang paling penting bagi perusahaan karena berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jika utang atau kewajiban meningkat, maka bank perlu mengusahakan meningkatnya sisi aktiva lancar. Jika kredit yang jatuh tempo atau mulai diwajibkan membayar angsuran, namun tidak mampu mengangsur, karena kredit tidak lancar atau bermasalah, maka bank terancam tidak likuid.

2. Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan membayar suatu bank apabila bank tersebut

dilikuidasi. Adanya kredit bermasalah dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Jika kerugian tersebut besar, bank akan mengalami kerugian besar pula, sehingga bukan tidak mungkin mengalami likuidasi.

3. Rentabilitas

Rentabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan berupa bunga kredit atau perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri ditambah modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba yang dinyatakan dalam prosentase. Jika kredit lancar dan tidak ada masalah, maka bank akan memperoleh penghasilan bunga dengan lancar pula.

4. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Hal ini terlihat pada perhitungan tingkat produktifitasnya, yang akan dituangkan dalam rumus ROA (*Return On Assets*). Jika kredit tidak lancar, maka profitabilitasnya menjadi kecil.

5. Bonafiditas

Bonafiditas adalah kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada suatu bank. Hal ini bukanlah masalah yang mudah, karena ini menyangkut citra. Adanya kredit bermasalah dapat merusak citra bank.

6. Tingkat Kesehatan Bank

Bank yang dilanda kredit bermasalah bisa menurunkan tingkat kesehatannya, dan pada gilirannya bank dapat dikenakan sanksi, bahkan bisa menghadapi likuidasi.

7. Modal Bank

Besar kecilnya ekspansi usaha bank sangat ditentukan dengan perkembangan kredit. Jika kredit tidak tumbuh dengan baik, maka bank juga tidak dapat berkembang dengan baik.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan diantaranya:

1. Thi Hong Hanh Pham (2015), dengan judul “ *Determinants of Bank Lending*”. Thi Hong Hanh Pham meneliti faktor penentu penyaluran kredit pada 146 negara periode 1990-2013. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa kredit bank akan diperbanyak saat tingkat suku bunga pinjaman tinggi, hasil empiris mengindikasikan bahwa *capital requirement*, nilai tukar, indeks KAOPEN, konsentrasi bank, dan NPL mempunyai hubungan negatif dengan penawaran kredit, serta pertumbuhan ekonomi mempengaruhi penyaluran kredit.
2. Billy Arma Pratama (2010) dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan Studi pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2005 – 2009”. Billy meneliti pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Loan (NPL)*, dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terhadap penyaluran kredit. Penelitian tersebut menggunakan Bank Umum secara keseluruhan sebagai satu unit obyek penelitian, dengan periode 2005-2009 (secara bulanan), serta menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. Sementara suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan.

3. Rofikoh Rokhim, dan Yinylia Rusli (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “*Macro Economics Factors And Bank Lending Behaviour In Indonesia*”. Mereka meneliti faktor ekonomi makro yang mempengaruhi distribusi pinjaman dan mengamati perbandingan masing-masing faktor berdasarkan jenis pinjaman yaitu pinjaman investasi, modal kerja dan konsumsi. Dengan menggunakan data dari bank-bank komersial di Indonesia antara 2003-2011, dengan menggunakan analisis data panel, ditemukan bahwa likuiditas perbankan dan tingkat inflasi berpengaruh negatif signifikan, sedangkan jumlah bank berpengaruh positif dan kuat untuk mendorong distribusi pinjaman pada semua jenis pinjaman. Selain itu, tingkat tabungan dan pertumbuhan PDB ditemukan tidak bermakna dalam kontribusinya untuk mempengaruhi distribusi kredit investasi, tetapi secara signifikan mempengaruhi distribusi pinjaman lainnya.
4. Greydi Normala Sari (2013) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Bank Umum Di Indonesia (Periode 2008.1 – 2012.2)”. Penyaluran kredit merupakan salah satu aktivitas bank umum yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan. Namun penyaluran kredit

belum optimal dilihat dari tingkat LDR yang berada dibawah harapan Bank Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Bank Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*) dan diolah dengan menggunakan program eviws 7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK, CAR, NPL, dan BI *Rate* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit di Indonesia. Bagi Bank Indonesi agar lebih berhati-hati dalam penentuan tingkat bunga BI *Rate*, dan bagi Bank Umum untuk menekan sekecil-kecilnya rasio NPL.

5. Irma Anindia (2011), dengan judul : Analisis Pengaruh CAR, LDR, NPL Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Penyaluran Kredit UMKM (Studi pada Bank Umum Periode 2003-2010). Penelitian ini menggunakan Bank Umum secara keseluruhan sebagai satu unit obyek penelitian, dengan periode penelitian dari tahun 2003- 2010 (secara bulanan). Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, sementara uji hipotesis menggunakan uji - t untuk menguji pengaruh variabel secara parsial serta uji - F untuk menguji pengaruh variabel secara serempak dengan tingkat signifikansi 5%. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh tingkat suku bunga, *Capital Adequacy ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), dan *Loan Deposit Ratio* (LDR) terhadap Penyaluran Kredit UMKM pada Bank Umum di Indonesia. Dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap penelitian ini diketahui secara simultan bahwa CAR, LDR, NPL dan suku bunga dengan uji F berpengaruh secara signifikan. Hasil secara parsial dengan uji t, diperoleh hasil bahwa variabel

CAR, NPL dan tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM dengan tingkat signifikansi 0,000, 0,000 dan 0,035, sedangkan variabel LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM.

6. Indri Manolita Igrisa (2017) dengan judul “Pengaruh Suku Bunga, Inflasi Dan Nilai Tukar Terhadap Penyaluran Kredit Pada Perbankan Di Kota Samarinda”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis secara simultan dan parsial pengaruh suku bunga, inflasi dan nilai tukar terhadap penyaluran kredit serta mengetahui variabel manakah yang paling berpengaruh dominan terhadap penyaluran kredit pada perbankan di Kota Samarinda. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode analisis regresi berganda yang dibantu dengan software SPSS versi 20. Teknik pengumpulan data dengan melakukan riset kepustakaan, browsing internet dan penelitian lapangan dengan sumber data dari BI dan BPS kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan suku bunga, inflasi dan nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada perbankan di Kota Samarinda. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan, inflasi tidak berpengaruh signifikan, dan nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit pada perbankan di Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan variabel suku bunga adalah variabel paling berpengaruh dominan terhadap penyaluran kredit pada perbankan di Kota Samarinda.

7. Yua Molek Winarti Putri, Alien Akmalia (2016) dengan judul Pengaruh Car, Npl, Roa Dan Ldr Terhadap Penyaluran Kredit Pada Perbankan (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang *Listed* di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Return On Asset (ROA), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Distribusi kredit bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Objek penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2011-2015. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 19 perusahaan perbankan. Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa secara parsial rasio CAR dan ROA memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. Rasio NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap distribusi kredit perbankan. Sedangkan rasio LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap distribusi kredit perbankan
8. Bayu Purnama Rohmadani dan Hendry Cahyono (2016) dengan judul “Pengaruh Net Interest Margin Dan Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Di Indonesia Pada Bank Umum Di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Net Interest Margin* (NIM) dan inflasi terhadap penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank umum di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sejak dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di kota Sidoarjo. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari

laporan keuangan Bank Indonesia (BI) dan Statistik Perbankan Indonesia (SPI). Metode yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan bantuan software Eviews. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa NIM dan inflasi berpengaruh signifikan negatif terhadap penyaluran kredit oleh bank umum di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan diatas bahwa penyaluran kredit perbankan dipengaruhi berbagai faktor. Dalam penelitian ini mencoba mengangkat faktor makro ekonomi yaitu Suku Bunga Bank Indonesia (*BI Rate*), nilai tukar (kurs) dan inflasi. Adapun faktor mikro ekonomi yaitu *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Loan (NPL)*, dan *Return On Assets (ROA)*.

2.3.1 Hubungan Suku Bunga Bank Indonesia (*BI Rate*) dengan Penyaluran Kredit

Suku Bunga (*BI Rate*) ditetapkan dan dilakukan pada saat Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dalam hal ini akan mempertimbangkan dan melakukan *review* atas perkembangan inflasi, nilai tukar, dan keadaan moneter serta kondisi likuidasi pasar apakah sesuai dengan hasil yang sudah ditetapkan pada saat Rapat Dewam Gubernur. Suku bunga (*BI Rate*) juga mempertimbangkan berbagai informasi dari eksternal seperti *leading indicators*, survei, *expert opinion*,, asesmen faktor risiko, dan juga ketidakpastian serta hasil riset ekonomi.

Suku bunga akan berdampak pada lesunya investasi dan aktivitas ekonomi sehingga menyebabkan turunya penyaluran kredit bank-bank umum. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat suku bunga maka penyaluran kredit akan semakin menurun atau berkurang, sebaliknya ketika suku bunga mengalami penurunan maka penyaluran kredit akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan Greydi Normala Sari (2013) menyatakan bahwa *BI Rate* berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit perbankan karena *BI Rate* merupakan tingkat bunga yang dijadikan acuan bagi Bank umum untuk mengambil keputusan dalam menentukan tingkat bunga kredit yang akan disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dana. Dalam hal ini juga menambahkan Bank Indonesia sebaiknya berhati-hati dalam penentuan *BI Rate*, Karena *BI Rate* mempengaruhi besar kecilnya penyaluran kredit perbankan.

2.3.2 Hubungan Inflasi dengan Penyaluran Kredit

Inflasi sering dikaitkan dengan jumlah uang yang beredar,

Inflasi merupakan salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya bunga kredit yang ditetapkan oleh perbankan. Ketika inflasi naik hal ini akan mempengaruhi tingginya beban kredit yang akan ditanggung oleh kreditur, maka masyarakat akan berpikir 2 kali atau bahkan mengurungkan niatnya untuk melakukan kredit. Hal ini tentu saja mengurangi nilai kredit yang disalurkan oleh perbankan di Indonesia, khususnya bank umum sehingga akan menghambat laju pertumbuhan nasional. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Bayu Purnama Rohmadani dan Hendry Cahyono (2016) bahwa inflasi berpengaruh

signifikan negatif terhadap penyaluran kredit oleh bank umum di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

2.3.3 Hubungan Nilai Tukar (Kurs) dengan Penyaluran Kredit

Bank Sentral mengendalikan suku bunga untuk menjaga stabil variabel makro yaitu inflasi dan nilai tukar (Ongeri Hezekiah Oturi, 2013). Nilai tukar adalah harga dari suatu mata uang terhadap mata uang lain. Menurut Samuelson Nordhaus (2004:305) nilai tukar ialah harga satu satuan mata uang dalam satuan mata uang lain.

Nilai tukar ialah salah satu dinamika krisis di Indonesia, pergerakan nilai tukar akan berpengaruh pada kredit yang disalurkan karena terdepresiasi nilai tukar akan diikuti oleh peningkatan biaya produksi khususnya produsen yang menggunakan bahan baku impor, kebutuhan modalpun semakin meningkat (Kuncoro dan Suhardjono, 2002).

Indri Manolita Igirisa (2017) menunjukkan bahwa variabel nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada perbankan di Kota Samarinda. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika berpengaruh terhadap penyaluran kredit perbankan di Kota Samarinda. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika menyebabkan naiknya harga-harga komoditas baik itu barang impor maupun barang ekspor.

2.3.4 Hubungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan Penyaluran Kredit

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001, setiap bank wajib memenuhi kecukupan modal 8%. Tingkat kecukupan modal pada perbankan diwakilkan dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko, yang dibiayai dari modal sendiri.

Capital Adequacy Ratio merupakan pemodalannya bagi semua bank yang digunakan untuk menyangga kegiatan operasional sebuah bank maupun untuk menyangga kemungkinan kerugian yang akan terjadi. Nilai CAR yang tinggi menunjukkan keadaan modal yang stabil sehingga akan meningkatkan kemampuan bank dalam mengantisipasi kerugian yang muncul dari kegiatan penyaluran kredit. Besarnya CAR juga mencerminkan besarnya modal yang dimiliki oleh bank tersebut, dengan modal yang cukup tinggi maka akan semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya (Yua Molek Winarti Putri, Alien Akmalia, 2016). Maka dari itu apabila bank memutuskan untuk menambahkan saluran kredit, maka dana modal / CAR akan digunakan untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan sebagai kredit. Artinya dengan penambahan kredit yang diluncurkan oleh suatu bank akan mengurangi nilai CAR dari bank tersebut.

2.3.5 Hubungan *Return On Assets* (ROA) dengan Penyaluran Kredit

Laba digunakan untuk menjaga kontinuitas berdirinya suatu bank. Laba adalah pendapatan bersih atau kinerja hasil pasti yang menunjukkan efek bersih kebijakan dari kegiatan bank dalam satu tahun anggaran.

ROA yang tinggi menunjukkan bank tersebut mendapatkan laba yang tinggi pula dari kegiatan penyaluran kredit. Artinya, bank telah menggunakan aktivitya dengan optimal dan mampu memperoleh pendapatan. Dengan perolehan laba yang tinggi dari penyaluran kredit tersebut maka bank akan terus menyalurkan kreditnya agar mendapatkan laba yang tinggi. Oleh karena itu, jika nilai ROA tinggi maka akan meningkatkan penyaluran kredit (Yua Molek Winarti Putri, Alien Akmalia, 2016).

2.3.6 Hubungan *Non Performing Loan* (NPL) dengan Penyaluran Kredit

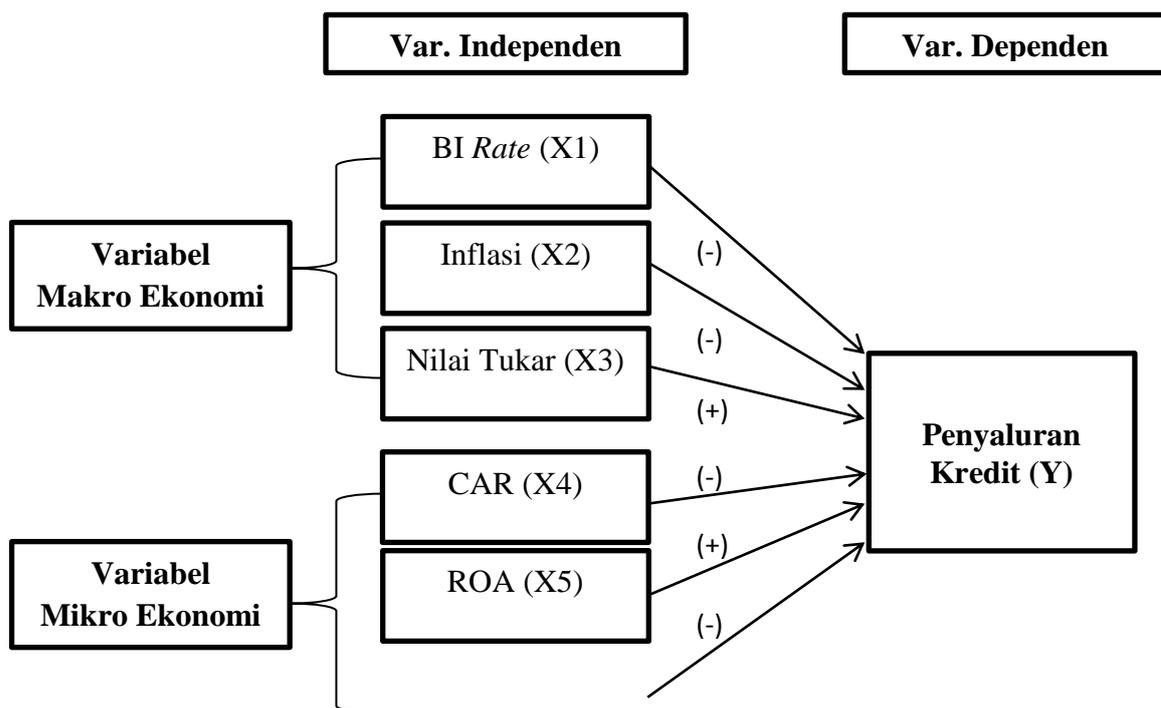
Kredit menjadi sumber pendapatan utama bagi bank, kinerja bank yang baik ditandai dengan lancarnya penyaluran kredit perbankan kepada masyarakat. Tetapi tingginya penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank akan memberikan resiko yang tinggi pula bagi bank yaitu akan terjadinya kredit bermasalah dan NPL akan tinggi.

Non Performing Loan (NPL) mencerminkan risiko kredit, semakin tinggi tingkat NPL maka akan menyebabkan semakin besarnya tingkat risiko kredit yang harus ditanggung oleh bank. Akibat dari tingginya NPL perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar sehingga mengakibatkan modal bank akan terkikis. Padahal, besarnya modal menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya penyaluran kredit. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin tinggi tingkat NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank (Ali, 2004). Tingginya NPL merupakan salah satu sebab sulitnya suatu bank untuk memberikan pinjaman. Penelitian yang dilakukan

Anindita (2011) menunjukkan adanya pengaruh negatif dan signifikan NPL terhadap kredit UMKM yang disalurkan Bank Umum Swasta Nasional.

Berdasarkan uraian diatas maka hubungan variabel dependen dan variabel independen dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran



NPL (X6)

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis *assosiatif*, dimana hipotesis *assosiatif* ini adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah *assosiatif*, yaitu menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2014:69).

Berdasarkan model penelitian tersebut, penulis membuat hipotesis yang akan diajukan dan dibuktikan kebenarannya sebagai berikut:

1. Hipotesa secara Parsial :
 - a. Suku Bunga Bank Indonesia (*BI Rate*) diduga berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
 - b. Inflasi diduga berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
 - c. Nilai tukar (kurs) diduga berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

- d. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) diduga berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
- e. *Return On Assets* (ROA) diduga berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
- f. *Non Performing Loan* (NPL) diduga berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2. Hipotesa secara Simultan :

Variabel makro ekonomi yaitu Bi rate, inflasi, dan kurs, serta variabel mikro ekonomi yaitu CAR, NPL, dan ROA diduga berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.